



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MANSUR MALAKAH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 447701

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/180 m2 di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 341 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp.
650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/38 m2 di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 311.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU AYL A 1.0 XMT (B100R8-GMQFJ) Tahun 2016,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.500.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 72.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.897.500.000

III. HUTANG Rp. 2.500.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.895.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.